

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang merusak sel-sel dalam sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan untuk melawan infeksi dan penyakit sehari-hari. Sedangkan AIDS (*Acquired Deficiency Syndrome*) merupakan nama yang digunakan untuk mendeskripsikan tentang infeksi ataupun penyakit yang dimana berpotensi mengancam jiwa seseorang karena sistem kekebalan tubuh telah rusak yang diakibatkan oleh virus HIV.¹

Human immunodeficiency virus atau HIV, telah berada di ujung kesehatan dan hak asasi manusia sejak pertama kali muncul sebagai epidemi pada awal 1980-an.² Karena hubungannya dengan kontak seksual pria-ke-pria, kerja seks komersial, dan penggunaan narkoba suntikan — perilaku yang dikriminalisasi di banyak negara — pencegahan dan kontrolnya dengan cepat menjadi fokus kontroversi yang signifikan.³ Pada tahun-tahun setelah kemunculan HIV, komunitas yang terkena dampak epidemi, aktivis hak asasi manusia, dan pakar kesehatan masyarakat menekankan bahwa, berbeda dengan tanggapan kesehatan masyarakat tradisional, tanggapan efektif terhadap HIV memerlukan perlindungan hak asasi manusia bagi mereka yang terkena dampak. dan berisiko mengalami epidemi. Pendekatan ini, disebut oleh Michael

¹https://www.hhrjournal.org/2017/12/at-the-nexus-how-hiv-related-immigration-policies-affect-foreign-nationals-and-citizens-in-south-korea/#_edn1 diakses pada 25 April 2019 pukul 20.22 WIB.

² Novogrodsky, "The duty of treatment: Human rights and HIV/AIDS Pandemic," *Yale Human Rights and Development Journal* 12/1 (2014), pp. 1–61 diakses pada 25 des 2018 pukul 20.28 WIB

³ M. Kirby, "Human rights and the HIV paradox," *Lancet*, 348/9036 (1996), pp. 1217–1218 diakses pada 25 April 2018 pukul 20.39 WIB

Kirby sebagai “paradoks HIV,” sejak itu telah dihadapkan dengan reaksi keras dari para politisi dan kelompok yang melihat kriminalisasi perilaku yang menyebarkan virus, dan marginalisasi lebih lanjut dari mereka yang terlibat di dalamnya, sebagai cara yang dapat diterima dari mengendalikan epidemi.⁴

Sementara kemajuan substansial telah dibuat dalam mengembangkan dan memperkuat basis bukti untuk strategi pencegahan HIV yang efektif, inisiatif ini masih menghadapi rintangan sosial dan politik. Stigma sosial tetap ada, dan hukum dan kebijakan kesehatan masyarakat yang membahayakan upaya untuk mengendalikan penyebaran infeksi adalah umum.⁵ Salah satu tindakan yang masih sering dilakukan saat ini — meskipun secara konsisten ditunjukkan sebagai tidak efektif dan dikutuk oleh badan-badan hak asasi manusia dan kesehatan masyarakat di seluruh dunia — adalah pembatasan perjalanan dan imigrasi terkait HIV.

Pembatasan imigrasi berdasarkan status HIV ditegakkan oleh Republik Korea (selanjutnya Korea) untuk kategori visa tertentu, meskipun komitmen perjanjian internasional dan pernyataan publik sebaliknya.⁶ Banyak negara di dunia masih menerapkan pembatasan seperti itu, mempertahankan undang-undang dan kebijakan yang menolak masuknya, tinggal, dan tinggal kepada orang yang hidup dengan HIV berdasarkan status HIV mereka. Pembatasan ini secara universal dikutuk karena melanggar hak asasi migran atas kerahasiaan dan persetujuan untuk pengujian, dan hak ODHA terhadap privasi, martabat, integritas tubuh, pekerjaan, dan perawatan

⁴ *Ibid*

⁵ UNAIDS, *On the fast-track to end AIDS: UNAIDS Strategy 2016–2021* (Geneva: UNAIDS, August 2015) diakses pada 25 April 2019 pukul 20.48 WIB

⁶ <http://thediplomat.com/2013/06/seouls-broken-promises-on-hiv-testing>. Diakses pada 25 April 2018 pukul 21.04 WIB

medis. Selain itu, kebijakan Korea juga merampas hak warganya untuk kesehatan dan informasi akurat tentang pencegahan HIV yang efektif.

Di Korea selatan sendiri ada organisasi yang dimana menjunjung hak asasi manusia bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS yakni *Republic of Korea's Network People Living with HIV/AIDS* (KNP+). KNP+ merupakan sebuah organisasi yang bermarkas di Seoul dengan sekitar 2.000 anggota, didirikan pada 2011 untuk membawa lima organisasi yang ada di bawah satu payung dan untuk memberikan suara bersama dan terhubung untuk komunitas HIV-positif di negara itu. Pada 30 Oktober 2015, setelah beberapa tahun berupaya, KNP + membuka kantor resmi pertama dan ruang komunitas.⁷ Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea, ada lebih dari 10.000 orang yang hidup dengan HIV di negara itu. Epidemik Republik Korea sangat terkonsentrasi di antara laki-laki gay di perkotaan, dengan laki-laki mewakili 92% dari semua infeksi HIV sejak pengumpulan data dimulai pada tahun 1985-2016 dan hal ini merupakan penanganan kasus yang rendah sesuai yang ditetapkan oleh standar global itu sendiri.

Dalam beberapa penelitian, terdapat satu tren menarik telah diamati sehubungan dengan rasio gender untuk infeksi HIV / AIDS di Korea. Ketika jumlah orang yang terinfeksi HIV meningkat, rasio gender saat ini (laki-laki yang terinfeksi HIV: perempuan yang terinfeksi HIV, 11: 1) juga meningkat. Rasio ini untuk infeksi HIV yang baru didiagnosis diproyeksikan menjadi 20: 1 pada tahun 2017, menunjukkan peningkatan dominasi pria saat ini dalam rasio. Hal lain yang menarik

⁷http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2015/november/20151110_RoK
diakses pada 25 April 2019 pukul 21.40 WIB

adalah bahwa pada 2012, sebagian besar orang yang terinfeksi HIV akan berusia 30-an (28%); Namun, saat ini, tingkat infeksi HIV meningkat pada orang yang berusia 20-an. Jadi, seperti hasil penelitian ini sarankan, kita dapat mengharapkan peningkatan tajam dalam jumlah orang yang terinfeksi HIV yang berusia 20-an dalam 5 tahun mendatang. Oleh karena itu, orang berusia 20-an membentuk kelompok sasaran untuk pencegahan HIV di Korea. Dalam penelitian sebelumnya tentang prevalensi HIV dan seroprevalensi virus herpes simpleks tipe 2, orang Korea berusia 20-an ditemukan memiliki tingkat infeksi yang rendah untuk kedua penyakit menular seksual ini⁸ ; Namun, perlu untuk memantau kelompok usia ini lebih hati-hati, mengingat tren perubahan saat ini.

Dari data diatas ditemukan bahwa penyakit HIV/AIDS di korea selatan merupakan penyakit ini salah satu yang menakutkan bagi warga korea selatan itu sendiri dikarenakan stigma yang sangat tinggi. Pada salah satu acara yang dilaksanakan oleh KNP+ ini yang dimana mendatangkan seorang dokter, Kim Minji, seorang dokter muda dan sukarelawan di KNP+, menjelaskan bahwa berbagai berbagai ketidaktahuan terhadap HIV yang ditemuinya di sekolah kedokteran yang mereka mengolok .⁹ Bahkan ada satu penderita HIV, Tuan Kim Woo, yang kehilangan gigi beberapa tahun lalu akan tetapi ketakutan akan status dirinya yang Positif HIV dan mencari Rumah sakit untuk membuat gigi tiruan dan mendapatkan satu Rumah sakit yang melayani seseorang dengan berbagai tanpa memandang status

⁸ Kee M.K., Lee J.H., Chu C. Characteristics of HIV seroprevalence of visitors to public health centers under the national HIV surveillance system in Korea: cross sectional study. BMC Public Health. 2009 May;9:123 diakses pada 25 April 2018 pukul 10.07 WIB

⁹ *Ibid*

penyakit. Dengan alasan itulah Choi memberanikan diri memeriksakan diri terhadap ujian pra- tes akan tetapi optimisme dan kepercayaan dirinya hancur ketika rumah sakit menolak memberikannya layanan

Karena stigma dalam kehidupan sehari-hari adalah salah satu perhatian utama yang paling banyak dikutip oleh anggota KNP +, organisasi dan mitranya memprioritaskan upaya untuk merespons. Dengan kantor tetapnya, KNP + sedang mempersiapkan untuk menyusun Indeks Stigma Orang yang Hidup dengan HIV pertama di Korea. Inisiatif Stigma Indeks adalah kolaborasi antara Jaringan Global Orang yang Hidup dengan HIV, Komunitas Internasional Perempuan yang Hidup dengan HIV / AIDS dan UNAIDS. Inisiatif ini bertujuan untuk mendokumentasikan stigma dan diskriminasi terkait HIV dan menyediakan mekanisme untuk membandingkan pengalaman di berbagai pengaturan dan sepanjang waktu. Temuan akan digunakan untuk mengadvokasi perubahan dan kemajuan untuk memperbaiki situasi. Indeks Stigma juga penting dalam hal ini memberdayakan orang yang hidup dengan HIV dalam proses, melibatkan mereka secara langsung dalam fase desain, penyebaran dan analisis. Pendekatan partisipatif ini dipimpin oleh organisasi orang yang hidup dengan HIV dengan dukungan dari mitra internasional dan domestik.¹⁰

Berangkat dari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian melalui studi kasus tentang advokasi akses pelayanan kesehatan KNP+ di korea selatan.. Hal ini berlandaskan dari realita yang ada mengenai pendiskriminasian terhadap penderita HIV/AIDS di Korea selatan.

¹⁰ *Ibid*

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang serta penjelasan permasalahan di atas, maka dapat di tarik pokok permasalahan seperti berikut ini :

“Bagaimana strategi KNP+ dalam Advokasi kasus terhadap Akses pelayanan kesehatan di korea selatan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)?”

C. KERANGKA BERPIKIR

Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep *“Transnational Advocacy Network (TAN)* milik Margareth Keck dan Kathryn Sikkink.

Konsep *Transnational Advocacy Network (TAN)*

Transnational Advocacy Network (TAN) menurut Kathryn Sikkink dan Margareth Keck merupakan aktor-aktor yang bekerja dalam skala internasional pada suatu isu, aktor -aktor ini disatukan oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi serta bantuan yang padat¹¹. Dimana para aktor-aktor tersebut bekerja sama untuk mengangkat suatu isu, norma, ataupun suatu fenomena yang baru.

Menurut Sikkink dan Keck konsep *Transnational Advocacy Network* memiliki keunikan tersendiri karena konsep ini sangat terorganisasi dimana untuk mempromosikan suatu perkara, ide-ide, norma-norma, serta seringkali melibatkan individu untuk turut mengadvokasikan suatu perubahan kebijakan¹².

¹¹ Ludong M.J dkk., *Gerakan Madres De La Plaza De Mayo dan Dampaknya Terhadap Penegakan HAM di Argentina*, Jurnal Wana Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin Vol 1 No.3. September – Desember 2016 Hal. 21-39

¹² *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics.* Dalam *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics.* Hal. 8

Aktor-aktor yang terdapat pada Konsep *Transnational Advocacy Network* ini tidak mengandalkan kekuatan yang berbentuk fisik seperti halnya ekonomi ataupun militer, melainkan jaringan dari aktor-aktor ini yang dimana mempunyai pengaruh yang meningkat dari waktu ke waktu sehingga menjadi salah satu aktor yang dapat diperhitungkan.

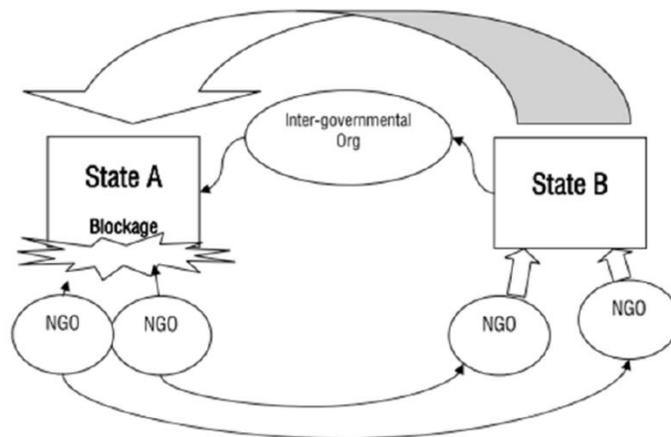
Jaringan tersebut menjadi semakin penting Karena memiliki keunikan dari cara mereka dalam melakukan advokasi. Dalam berkampanye, mereka membawa latar belakang khusus, seperti membawa isu tentang pelestarian lingkungan ataupun sebagainya. Ketika proses pembuatan keputusan yang hanya bisa diakses oleh aktor-aktor tradisional seperti negara, kelompok-kelompok advokasi membuka dan ikut masuk didalam arena tersebut dengan membawa suara serta kepentingan masyarakat yang tidak memiliki akses ke dalam arena. Dengan kata lain, Jaringan Advokasi Transnasional mengangkat isu dari masyarakat agar isu tersebut dapat didengar dan diperhatikan¹³.

Dalam hal ini, konsep *Transnational Advocacy Network* memiliki tujuh aktor utama yang dimana mampu memberikan peran penting, yaitu NGO (*Non-Governmental Organization*) baik skala national ataupun internasional, yayasan , media, *Local Social Movement*, Pelaku aktivitas perdagangan dan peneliti, Organisasi Keagamaan, badan eksekutif ataupun parlemen dari suatu pemerintahan, serta organisasi *Regional* dan *Internasional*.

Akan tetapi tidak semua aktor-aktor itu dapat membentuk sebuah jaringan advokasi Transnasional, hanya beberapa dari mereka saja. Menurut konsep

¹³ Margareth E. Keck & Kathryn Sikkink, *op. cit.* hal. 9

Transnational Advocacy Network aktor yang mempunyai peran penting dalam melakukan advokasi yakni Pemerintah, *Local Social Movement*, serta pelaku aktivitas perdagangan dan para peneliti, sedangkan untuk masuk ke ranah politik domestic sebuah Negara, aktor-aktor TAN sering kali mendapatkan gangguan. Maka dari itu cara mereka yakni menggunakan koneksi dari luar (Jaringan Internasional) sehingga dapat membantu segala sesuatu persoalan yang dihadapi, dan dari itulah akan terbentuk pola hubungan “*Boomerang Pattern*” menurut Keck dan Sikkink.



Sumber : Keck & Sikkink; Activists Beyond Border: Advocacy Network in International Politics (1998), hal. 13

Boomerang Pattern muncul sebagai model interaksi antara aktor-aktor *Transnational Advocacy Network* yang diakibatkan oleh jalur aspirasi yang terhambat dari aktor-aktor domestic dalam suatu Negara ke aktor pemerintah itu sendiri. Langkah-langkah alternatif diambil oleh aktor-aktor dalam membangun jaringan untuk mencari dukungan dan memperjuangkan isu-isu yang diajukannya, agar dapat mempenaruhi pemerintahan di negaranya dari luar melalui aktor-aktor internasional.

Dalam pelaksanaan advokasi ini, Keck & Sikkink membagi beberapa cara yang dapat ditempuh oleh TAN yakni, *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Lavarage Politics*, dan *Accountability Politics*.

Information Politic merupakan pengembangan informasi secara politik guna mengarahkan informasi tersebut sehingga dapat menghasilkan pengaruh yang besar secara cepat dan tepat.

Symbolic Politics merupakan suatu tindakan yang dimana menggunakan simbol-simbol yang dapat mewakili isu yang diangkat kepada masyarakat luas baik nasional maupun internasional.

Lavarage Politics merupakan kemampuan untuk mengumpulkan aktor-aktor yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi rakyat agar mampu memperkuat suatu pergerakan yang dilaksanakan.

Accountability Politics merupakan suatu kegiatan yang dimana menjaga dan mengawasi lembaga pemerintahan agar tetap mempertahankan kebijakan yang sesuai dengan mereka yang dimana aktor ini digerakkan oleh komunitas ataupun anggota dari jaringan.

Semua strategi politik tersebut digunakan untuk menganalisa proses dan strategi advokasi yang dilaksanakan oleh KNP+ ini dalam membentuk opini public maupun untuk memengaruhi segala lini baik itu pemerintahan, tempat pelayanan kesehatan, serta pendidikan di korea selatan.

Jika dilihat menurut strategi politik yang Keck dan Sikkink jelaskan, KNP+ melakukan *Information Politics*, *Symbolic Politics*, dan *Lavarage Politics* untuk membentuk dan mengubah opini publik¹⁴

Dalam strategi *Information Politics*, KNP+ selalu menyebarkan informasi tentang HIV/AIDS di korea selatan dan terus menyuaran keinginan mereka terhadap diskriminasi dan stigma masyarakat baik itu nasional dan internasional. Hal ini dapat dilihat dari berbagai informasi yang terus-menerus diperbaharui oleh KNP+ ini melalui media massa, elektronik, website, dan sosialisasi-sosialisasi. Selain memanfaatkan media social, KNP+ juga dibantu oleh beberapa lembaga-lembaga swadaya masyarakat terkait isu kesehatan dan HAM.

Dalam strategi *Symbolic Politics*, salah satu contohnya yakni KNP+ menggunakan simbol-simbol berupa aksi damai, demonstrasi, konser amal, dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk memperingati hari HIV/AIDS sedunia tepatnya 01 Desember setiap tahunnya.

Dalam strategi *Lavarage Politics*, KNP+ ini memperkuat dan memperluas jaringan-jaringannya dengan menggandeng organisasi di korea selatan maupun organisasi internasional yang dimana memiliki *power* yang besar dan aktor yang berpengaruh seperti UNAIDS, *Asia Pasisfic Calition on Male Sexual Health* (APCOM), *Korean Alliance to Defeat AIDS* (KADA), dan *Korean Federation for AIDS Prevention/Korea UNAIDS Information and Support Center* (KUISC).

Dalam strategi *Accountability Politics*, Pemerintah korea mengeluarkan peraturan tentang batasan Visa bagi warga asing di korea selatan terkait penderita

¹⁴ *Loc.cit*

HIV yang mau mengajar bahasa inggris, pekerja kasar atau sebagai penghibur (eufeminisme yang sering dilakukan untuk pekerja seks). Dalam hal ini KNP+ melaporkan syarat tersebut ke UNAIDS dikarenakan hal itu melanggar hak Privasi seseorang dan mendapatkan diskriminasi dari pemerintah korea selatan.

D. HIPOTESA

Strategi advokasi yang dilakukan oleh KNP+ terhadap akses pelayanan kesehatan bagi penderita HIV/AIDS di Korea Selatan yaitu gerakan KNP+ melakukan strategi yang digunakan sehingga mampu mencapai tujuan diantaranya :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat luas baik itu nasional maupun internasional dari berbagai lini seperti hal nya di bidang kesehatan bahwa ODHA membutuhkan pelayanan yang sama dengan yang lain.
2. Melakukan aksi damai, demonstrasi, sosialisasi, dan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik dukungan dari masyarakat luas agar stigma mereka terhadap Penderita HIV/AIDS dapat berubah.
3. Memberikan tekanan moral terhadap pemerintah melalui jalur kerjasama dengan NGO internasional.
4. KNP+ sebagai aktor advokasi melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan instansi lainnya di korea selatan.

E. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeksripsikan tentang isu HIV/AIDS di korea Selatan
2. Mendeksripsikan tentang strategi KNP+ terhadap advokasi akses pelayan kesehatan bagi penderita HIV/AIDS di korea selatan

3. Untuk mengetahui kinerja maupun strategi yang dilakukan oleh KNP+ beserta aliansinya dalam mempengaruhi sebuah kebijakan.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data merupakan langkah dalam metode ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengadakan penelitian kepustakaan terhadap buku, makalah, jurnal ilmiah, majalah atau koran, dan laporan tahunan dari yang diterbitkan oleh instansi atau badan pemerintah yang mengkaji masalah internasional dan sumber yang dianggap resmi, kemudian dianalisa, bagaimana tiap variabel yang saling berhubungan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini menggunakan sistem penulisan secara deksriptif dengan membuat sub-sub pokok yang dapat menguraikan permasalahan untuk dapat menjawab pokok permasalahan diatas.

Pada Bab Pertama, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Berpikir, Hipotesa, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, akan berisi tentang deksripsi aktor advokasi yakni KNP+ dan UNAIDS, baik profil kedua actor tersebut, program kerja, serta kegiatan rutin yang dilakukan

Bab ketiga, akan berisi kebijakan pemerintah Korea selatan terhadap Penderita HIV/AIDS yang didalamnya pertama AIDS Phobia, Pencabutan dana

Rumah Sakit Khusus untuk penderita HIV/AIDS, selanjutnya kebijakan imigrasi terkait HIV/ADIS bagi warga korea selatan dan warga negara Asing..

Bab keempat, akan mendeskripsikan tentang strategi advokasi yang dilakukan oleh KNP+ sesuai strategi advokasi dalam konsep TAN yaitu *Information Politicc, Symbolic Politics, Lavarage Politics*, dan *Accountability Politic*.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan.